

KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN PERIKANAN ERA NEW NORMAL PASCA PANDEMI COVID-19



Gagasan Inovasi Masa Depan



**Suhana, Rieny Sulistijowati, Yudi Nurul Ihsan,
M. Janib Achmad, Ardan Samman, Supyan,
Nebuchadnezzar, Hasim, Ifah Munifah,
M. Zaki Mahasin, Emma Rochima,
Marten A. Taha, Azis Salam, Lis M. Yapanto,
Achmad Rizal, Eddy Afrianto, Amir Halid,
La Ode M. Aslan, Dina Fransiska,
Arsya Rizki Falafi, Panji Priambudi,
Hari Eko Irianto, Cenny Putnarubun**

Editor:

Dr. Rieny Sulistijowati S, S.Pi, M.Si.

Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H., M.M., Ak., CA.

**Keberlanjutan
Pengelolaan Perikanan
Era New Normal Pasca
Pandemi Covid-19**

Gagasan Inovasi Masa Depan

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19

Gagasan Inovasi Masa Depan

**Suhana, Rieny Sulistijowati, Yudi Nurul Ihsan, M. Janib Achmad,
Ardan Samman, Supyan, Nebuchadnezzar Akbar, Hasim, Ifah Munifah,
M. Zaki Mahasin, Emma Rochima, Marten A. Taha, Aziz Salam,
Lis M. Yapanto, Achmad Rizal, Eddy Afrianto, Amir Halid,
La Ode Muhamad Aslan, Dina Fransiska, Arsyah Rizki Falafi,
Panji Priambudi, Hari Eko Irianto, Cenny Putnarubun**

**Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan
Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19
Gagasan Inovasi Masa Depan**

Suhana, dkk.

Editor:

**Dr. Rieny Sulistijowati S, S.Pi., M.Si.
Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H., M.M., Ak., CA.**

Desainer:

Mifta Ardila

Sumber:

www.insancendekiamandiri.co.id

Penata Letak:

Tiya Arika Marlin

Proofreader:

Tim ICM

Ukuran:

x, 345 hlm., 15,5x23 cm

ISBN:

978-623-348-089-5

Cetakan Pertama:

Mei 2021

Hak Cipta 2021, Suhana, dkk.

Isi di luar tanggung jawab penerbitan dan percetakan

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

**Anggota IKAPI: 020/SBA/20
PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI
(Grup Penerbitan CV INSAN CENDEKIA MANDIRI)**

Perumahan Gardena Maisa, Blok F03, Nagari Koto Baru,
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
Provinsi Sumatera Barat – Indonesia 27361
HP/WA: 0813-7272-5118
Website: www.insancendekiamandiri.co.id
www.insancendekiamandiri.com
E-mail: penerbitbic@gmail.com

Prakata	ix
Suhana Resiliensi Ekonomi Perikanan di Masa Pandemi Covid-19.....	1
Rieny Sulistijowati Penerapan Sertifikasi Halal Produk Perikanan: Peluang Lapangan Kerja di Era <i>New Normal</i>	21
Yudi Nurul Ihsan Dampak Covid-19 terhadap Sumber Daya dan Kesehatan Laut.....	43
M. Janib Achmad, Ardan Samman, Supyan dan Nebuchadnezzar Akbar Analisis Dampak Covid-19 terhadap Aktivitas Nelayan Maluku Utara	67
Hasim Dampak Covid-19 dan Rekomendasi terhadap Perikanan Tangkap Tradisional dan Budidaya di Indonesia	93
Ifah Munifah Ketahanan Pangan dalam Perspektif Kelautan Perikanan sebagai Strategi Pemenuhan Kebutuhan Protein di Masa Pandemi Covid	111
M. Zaki Mahasin Pengelolaan Komoditas Garam Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan Historiografis.....	131

Emma Rochima Potensi Nanomaterial Basis Perikanan untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan (Inovasi Edible Film Biokomposit)	149
Marten A. Taha dan Aziz Salam Kearifan Lokal dari Olele: Tinjauan Pustaka Pengembangan Budidaya Maritim di Gorontalo.....	171
Lis M. Yapanto Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dalam Peningkatan Ekonomi di Kawasan Teluk Tomini ...	187
Achmad Rizal Potret Rantai Pasokan (<i>Supply Chain</i>) Produk Perikanan di Pasar Tradisional Kota Bandung pada Masa Pandemi Covid-19	205
Eddy Afrianto Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Melalui Pendekatan Keamanan Pangan	225
Amir Halid Penentuan Komoditas Unggulan Wilayah Sub-Sektor Perikanan di Kabupaten Pohuwato	241
La Ode Muhammad Aslan Pengembangan Industri Budidaya Rumput Laut Masa Covid-19.....	263
Dina Fransiska, Arsyah Rizki Falafi, Panji Priambudi dan Hari Eko Irianto Edible Film dari Rumput laut	289

Canny Putnarubun

Pengembangan Produk Perikanan Peluang Usaha Baru

Pasca Pandemi Covid-19 327

PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PENINGKATAN EKONOMI DI KAWASAN TELUK TOMINI

Lis M.Yapanto

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo
Jalan Jenderal Sudirman no. 6 Kota Gorontalo
Email: lizrossler@ung.ac.id

A. Pendahuluan

Suatu pembangunan telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, disparitas, dan pengangguran dalam konteks pembangunan ekonomi negara berkembang (Todaro dan Smith, 2003). Dalam perkembangan ekonomi, pendapatan perkapita masyarakat semakin meningkat dan terjadi pula perubahan prinsip struktur ekonomi. Perkins et al., (2001) menyebutkan dua hal penting tentang perubahan struktural ini yaitu meningkatnya kontribusi industri, seiring dengan menurunnya kontribusi pertanian dalam output nasional, dan peningkatan persentase penduduk yang tinggal di Indonesia, di kota dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan. Salah satu bentuk pembangunan adalah *community development* dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Kemandirian merupakan sumber kehidupan yang kekal dan sebagai modal utama masyarakat untuk mengembangkan dan mempertahankan diri di tengah-tengah masyarakat lain. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan juga hasil dari proses

tersebut. Pemberdayaan diwujudkan sebagai redistribusi kekuasaan, baik antar daerah, kelas, ras, jenis kelamin, maupun individu (Tampubolon, 2012).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai sangat penting untuk mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat agar menjadi tangguh dan mandiri; meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan adalah memberdayakan usaha masyarakat hingga lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang luas. Dalam pembinaan usaha masyarakat perlu dikembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk hubungan usaha yang saling mendukung dan menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil serta koperasi guna memperkuat struktur perekonomian (Tampubolon, 2012).

Selain program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada komunitas nelayan adalah dengan membekali mereka dengan pengetahuan tentang pentingnya hidup berkelompok. Gaya hidup berkelompok sebenarnya sudah lama dikenal, namun aktivitas mereka belum mendorong peningkatan ekonomi sosial mereka (Ermayanti, 2014).

Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dengan mengelola potensi sumberdaya perikanan. Masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah pesisir memiliki ciri-ciri sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. Di beberapa wilayah pesisir yang relatif berkembang pesat,

struktur sosialnya heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki solidaritas sosial yang kuat yang terbuka terhadap perubahan, dan memiliki ciri interaksi sosial yang dalam. Masyarakat nelayan pada umumnya memiliki pola interaksi yang sangat dalam, terlihat dari hubungan kerja sama dalam melakukan kegiatan, bersilaturahmi baik antar nelayan maupun antar nelayan dengan masyarakat lainnya. Mereka memiliki tujuan yang jelas dalam menjalankan usahanya, dan dilakukan dengan sistem permanen, sesuai dengan budaya masyarakat nelayan (Fargomeli, 2014).

B. Strategi Penguatan Kelembagaan

Berbagai penelitian tentang kehidupan nelayan pada umumnya menekankan pada kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi karena kesulitan yang dihadapi oleh nelayan dan keluarganya (Acheson, 1981). Kehidupan nelayan bisa dikatakan tidak hanya tidak cukup tetapi juga masih terbelakang, termasuk dalam hal pendidikan. Batasan sosial yang dialami nelayan tidak diimplementasikan dalam bentuk alienasi karena secara fisik komunitas nelayan tidak terisolir atau terasing. Namun, hal tersebut lebih diimplementasikan pada ketidakmampuan mereka untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan, yang ditunjukkan oleh kelemahan mereka dalam mengembangkan organisasi di luar lingkungan keluarga atau komunitas lokalnya (Boedhisantoso, 1999; Zamzami, 2010: 114). Sulit bagi mereka untuk lepas dari belenggu kemiskinan karena mereka mengalami keterbatasan kualitas sumber daya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar dan permodalan.

Kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan bagi masyarakat di wilayah pesisir masih belum optimal dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kese-

jahteraannya. Ini karena porsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan dalam upaya mengatasi fenomena masyarakat nelayan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Salah satu media dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah melalui kelompok nelayan. Kelompok nelayan yang ada saat ini belum berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, sehingga diperlukan strategi pembinaan kelompok nelayan melalui strategi penguatan ekonomi guna meningkatkan pendapatan nelayan. Adapun prioritas aspek dalam strategi penguatan perekonomian yaitu: aspek partisipasi, aspek permodalan, aspek kemitraan, dan aspek teknologi. Prioritas alternatif dalam strategi penguatan ekonomi nelayan menunjukkan tiga urutan dari 12 alternatif strategi tersebut, yaitu sosialisasi pentingnya kelompok, peningkatan partisipasi aktif, dan peningkatan jumlah pertemuan.

Dewasa ini posisi kelembagaan lokal yang telah berurat akar masyarakat nelayan mendapat gempuran dari kekuatan supralokal dan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Proses marginalisasi kelembagaan lokal masyarakat nelayan, ditunjukkan dengan pudarnya kelembagaan Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam, AwigAwig di Nusa Tenggara Barat, Malombo di Sulawesi Utara, Rompong di Sulawesi Selatan, Sasi di Maluku dan Maluku Utara, dan Pele-Karang di Papua. Gempuran kekuatan supralokal dan global yang menerpa masyarakat nelayan ditunjukkan dengan melekatnya atribut kemiskinan dan ketertinggalan pada masyarakat nelayan. Sentra-sentra masyarakat nelayan baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa menjadi sentra kemiskinan. Tempat tinggal dan pemukiman yang kumuh, pendapatan yang rendah, angka putus sekolah yang

tinggi, terlilit hutang sepanjang tahun, ketergantungan dapur dan berlayar pada juragan dan pembunga uang (rentenir) merupakan gambaran yang melekat pada masyarakat nelayan. Beberapa indikasi tersebut merupakan gambaran ketidak berdayaan masyarakat nelayan, baik secara ekonomi dan politik. Secara struktural adanya ketidak-berdayaan masyarakat nelayan berhubungan erat dengan kebijakan dan model pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis teknologi dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semta-mata. Pembangunan kelautan dan perikanan berbasis teknologi yang lebih dikenal dengan revolusi biru, diakui berhasil melakukan mekanisasi dan motorisasi peralatan penangkapan ikan. Akan tetapi, program tersebut bias pada pemilik modal dan juragan. Mengingat mekanisasi dan motorisasi peralatan penangkapan ikan tidak bersifat netral, sebaliknya berpihak kepada pemilik modal dan pemegang kuasa dan orang-orang yang terdekat dan memiliki jaringan ekonomi dan kekuasaan. Kelompok masyarakat nelayan yang diuntungkan oleh program mekanisasi dan motorisasi peralatan penangkapan ikan adalah elit nelayan, juragan, pemilik kapal dan pembunga uang. Sementara nelayan tradisional, nelayan buruh, para awak kapal dan pekerja harian lainnya, nasib dan kehidupan ekonominya tak mengalami perbaikan. Pada kasus masyarakat nelayan di Konawe Selatan dan pulau Bintan, (kepulauan Riau), program revolusi biru yang berlangsung selama rezim Orde Baru dan rezim otonomi daerah dewasa ini, ternyata tidak mengubah hubungan kerja yang eksploitatif antara buru pemilik kapal dan atau pemilik modal. Demikian juga kehidupan ekonomi nelayan tradisional tidak mengalami perubahan yang berarti. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh pemangku otoritas dan instansi terkait pada banyak kasus

dilakukan dengan setengah hati dan berorientasi pada pencapaian target dan sasaran kuantitatif, untuk sekedar memenuhi tuntutan teknis administrasi keuangan dan administrasi proyek, seperti penyerapan dana dan kegiatan yang sesuai dengan tahapan dan jadwal kegiatan. Sementara aspek kualitatif pencapaian pembangunan masyarakat, sejauhmana masyarakat nelayan mengalami perbaikan dan diberdayakan secara ekonomi, sosial dan politik tidak menjadi tujuan dan sasaran program pembangunan kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih menekankan pada dimensi produktivitas dan dilakukan dengan setengah hati menyebabkan nasib dan kondisi masyarakat nelayan tidak mengalami perubahan dan perbaikan secara kualitatif. Model pembangunan kelautan dan perikanan berorientasi produktivitas semata-mata sering berkorelasi dan berpihak pada pemilik modal, sehingga posisi sebagian besar masyarakat nelayan sering menjadi sasaran pembangunan korban kebijakan dan pembangunan. Dalam konteks inilah perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan secara sinergi dan holistik. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Nelayan secara teoritik dapat dikemukakan, bahwa tanpa adanya peningkatan kapasitas kelembagaannya, mustahil masyarakat dapat mempertahankan keberlanjutannya secara sosial dan ekonomi. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan merupakan upaya menciptakan daya dukung, kemampuan dan kemandirian sosial, ekonomi dan politik.

Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan dalam dapat dilakukan melalui aras individual, organisasi dan sistem. Pada aras individu peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan ditujukan untuk meningkatkan etos

kinerja yang efisien, rasional dan bersahabat dengan sumber daya dan ekologi di mana mereka membangun relasi sosial, budaya, komunitas dan habitatnya. Peningkatan kapasitas secara individual dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bantuan modal, keterampilan, etos kerja, dan kompetensi personal. Perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan secara perorangan juga mensyaratkan adanya upaya peningkatan akses informasi pada berbagai sumber finansial, perkreditan, permodalan dan teknologi. Peningkatan kapasitas individual juga dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan keterampilan dan teknologi penangkapan, jaringan pemasaran dan fasilitasi manajemen keuangan. Program peningkatan kapasitas individual hanyalah merupakan salah satu komponen dari peningkatan kapasitas kelembagaan secara keseluruhan. Kapasitas kelembagaan lainnya yang perlu diperbaiki adalah kapasitas organisasi dan sistem regulasi atau kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang berpihak pada masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan secara individual selayaknya dilakukan pada ketiga aras tersebut secara holistik, sinergi dan seimbang. Peningkatan kapasitas kelembagaan hanya menekankan pada salah satu aspek tidak akan berhasil guna dan berdaya guna, baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan serta prinsip-prinsip peningkatan kapasitas kelembagaan secara holistik dan sinergi antar sektor menurut Horton mencakup komponen sebagai berikut:

1. mengutamakan peningkatan inisiatif sendiri;
2. memfokuskan pada kebutuhan dan prioritas organisasi secara keseluruhan;
3. memberikan perhatian yang lebih banyak kepada proses;

4. pemantauan dan evaluasi secara build in sejak permulaan;
5. memandang peningkatan kapasitas sebagai lebih dari satu kegiatan;
6. mempertemukan stakeholder dalam proses peningkatan kapasitas;
7. memperkuat dukungan politik dan menjaga otonomi;
8. meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berubah.

Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan Keberhasilan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat ditentukan oleh desain dan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang holistik berpeluang lebih memberdayakan daripada pendekatan parsial. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan akan berdaya guna bila program dan kegiatannya disertai dengan perbaikan kondisi sumberdaya dan lingkungannya. Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan, paling tidak mensyaratkan empat hal yakni pengembangan sumberdaya manusia, kesempatan berusaha, perbaikan pengelolaan sumber daya dan perbaikan lingkungan yang dilakukan secara terpadu dan bersinergi.

Strategi peningkatan masyarakat nelayan sumber: Dirangkum dari beberapa sumber nina manusia adalah bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan mengembangkan sumber daya manusianya. Kegiatannya mencakup:

1. Investasi modal manusia (*human capital*) dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok baik formal maupun informal sebagai suatu cara untuk mensinergikan dan memadukan kekuatan individu.
3. Memperluas dan mengintegrasikan mandat organisasi dan kelompok sehingga efisiensi bisa tercapai.
4. Strategi Peningkatan Masyarakat Nelayan Bina Manusia (SDM), Bina Lingkungan, Bina Usaha, Bina Sumber Daya (SDA).
5. Menghilangkan sifat dan mental negatif, boros, konsumtif yang memasung produktivitas dan menghambat pembangunan.

Bina lingkungan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan melalui perbaikan lingkungan tempat tinggal dan prasarana produksi serta meningkatkan peran masyarakat dalam menata dan mengelola lingkungan hidupnya. Strategi ini mencakup:

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal maupun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif.
2. Membangun infrastruktur terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.
3. Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di wilayah pesisir dan daya dukung lingkungannya.
4. Memperkaya sumberdaya melalui kegiatan pengayaan stok ikan dan habitat, konservasi dan rehabilitasi, mitigasi bencana, dan mengendalikan pencemaran. Bina sumber daya adalah strategi pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelibatan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut.

Strategi ini mencakup usaha:

1. Memberikan konsepsi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut berkelanjutan.
2. Menghidupkan kembali hak ulayat dan hak masyarakat local.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menerapkan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan teknologi lokal (*indigenous technology*).
5. Membangun kesadaran akan pentingnya nilai sumber daya bagi generasi kini dan yang akan datang, dan
6. Merehabilitasi habitat, dan memperkaya sumber daya.

Bina sumber daya merupakan bentuk pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan sumber daya alam pesisir. Dalam hal pengembangan perikanan tangkap, bina sumberdaya ini adalah upaya untuk menerapkan apa yang dikenal dengan *Community-Based Fishery Resource Management (CBFRM)*. Pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan CBFRM menjadi lebih produktif, terjadi pemerataan hasil dan peningkatan kesejahteraan nelayan secara proporsional dan sumberdaya ke arah dan lebih keberlanjutan. Bina usaha meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap permoldan yang dapat ditempuh melalui hubungan langsung antara masyarakat dengan sumber modal, hubungan secara kelompok antara masyarakat dengan sumber modal dengan atau tanpa jaminan dari pihak ketiga, hubungan antara pengusaha skala kecil secara individual atau secara kelompok dengan pengusaha skala besar atau BUMN, serta penyatuan kekuatan modal yang dimiliki masyarakat kecil secara individu.

C. Peningkatan Ekonomi Wilayah Pesisir Teluk Tomini

Dalam rangka peningkatan ekonomi di wilayah pesisir Teluk Tomini maka perlu adanya beberapa strategi dalam peningkatan dan penguatan ekonomi di wilayah pesisir. Menurut Yapanto, L.M. (2021) bahwa variable terpenting dalam penguatan dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir khususnya rumah tangga nelayan adalah peningkatan teknologi, dan modal usaha. Kekuatan variable teknologi, modal usaha mendominasi diversifikasi usaha yang ada di masyarakat pesisir Kawasan Teluk Tomini Provinsi Gorontalo, untuk itu perlu adanya penguatan kelembagaan perikanan.

Suatu pembangunan telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, disparitas, dan pengangguran dalam konteks pembangunan ekonomi negara berkembang. Dalam perkembangan ekonomi, pendapatan perkapita masyarakat semakin meningkat dan terjadi pula perubahan prinsip struktur ekonomi. Perkins *et al.*, (2001), menyebutkan dua hal penting tentang perubahan struktural ini yaitu meningkatnya kontribusi industri, seiring dengan menurunnya kontribusi pertanian dalam output nasional, dan peningkatan persentase penduduk yang tinggal di kota dibandingkan dengan yang hidup di daerah pedesaan.

Salah satu bentuk pembangunan adalah *community development* dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Kemandirian merupakan sumber kehidupan yang kekal dan sebagai modal utama komunitas untuk mengembangkan dan mempertahankan diri di tengah-tengah komunitas lainnya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan juga hasil dari proses tersebut. Pemberdayaan diwujudkan sebagai redistribusi kekuasaan, baik antardaerah, kelas, ras, jenis kelamin, maupun individu (Tampubolon, 2012).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai sangat penting untuk mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat agar menjadi tangguh dan mandiri; meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan adalah memberdayakan usaha masyarakat agar menjadi lebih efisien, lebih produktif, dan lebih banyak lagi. Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan, keberhasilan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat ditentukan oleh desain dan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang holistik berpeluang lebih memberdayakan daripada pendekatan parsial. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan akan berdaya guna bila program dan kegiatannya disertai dengan perbaikan kondisi sumber daya dan lingkungannya. Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat nelayan, paling tidak mensyaratkan empat hal yakni pengembangan sumber daya manusia, kesempatan berusaha, perbaikan pengelolaan sumberdaya dan perbaikan lingkungan yang dilakukan secara terpadu dan bersinergi.

Strategi peningkatan masyarakat nelayan sumber: dirangkum dari beberapa sumber bina manusia adalah bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan mengembangkan sumber daya manusianya. Kegiatannya mencakup:

1. investasi modal manusia (*human capital*) dalam bidang pendidikan dan kesehatan;

2. peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok baik formal maupun informal sebagai suatu cara untuk men-sinergikan dan memadukan kekuatan individu;
3. memperluas dan mengintegrasikan mandat organisasi dan kelompok sehingga efisiensi bisa tercapai;
4. Strategi Peningkatan Masyarakat Nelayan Bina Manusia (SDM) Bina Lingkungan Bina Usaha Bina Sumber daya (SDA) memperbaiki budaya kerja, kerja keras, tanggung jawab, dan hemat, dan
5. menghilangkan sifat dan mental negatif, boros, konsumtif yang memasung produktivitas dan menghambat pembangunan.

Bina sumber daya merupakan bentuk pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan sumberdaya alam pesisir. Dalam hal pengembangan perikanan tangkap, bina sumberdaya ini adalah upaya untuk menerapkan apa yang dikenal dengan *Community-Based Fishery Resource Management (CBFRM)*. Berdasarkan penelitian terdahulu di Lombok Barat (NTB) dan Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), ditemukan, bahwa pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan CBFRM menjadi lebih produktif, terjadi pemerataan hasil dan peningkatan kesejahteraan nelayan secara proporsional dan sumberdaya ke arah dan lebih keberlanjutan. Bina usaha meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan yang dapat ditempuh melalui hubungan langsung antara masyarakat dengan sumber modal, hubungan secara kelompok antara masyarakat dengan sumber modal dengan atau tanpa jaminan dari pihak ketiga, hubungan antara pengusaha skala kecil secara individual atau secara kelompok dengan pengusaha skala besar atau BUMN, serta

penyatuan kekuatan modal yang dimiliki masyarakat kecil secara individu.



**Gambar 1. Potensi Pesisir Pantai Desa Olele
Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
(Sumber: Koleksi pribadi)**

Penutup

Keberadaan tradisi, kelembagaan dan kearifan lokal di sepanjang pantai Teluk Tomini merupakan khazanah kebudayaan nusantara yang bersifat strategis baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembangunan sumber daya laut berkelanjutan maupun untuk peningkatan kemandirian dan keswadayaan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang sudah bersedia memberikan informasi demi kelengkapan *Book Chapter* ini.

Daftar Pustaka

- Acheson, (1981). *Annual Review of Anthropology* 1981:10: 1, 275-316.
<https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.an.10.100181.001423>
- Boedhisantoso, S. (1999). Komunitas Lokal di Kawasan Pesisir dan Pembedayaannya. Makalah Lokakarya Pembangunan Pranata Sosial Komunitas pesisir.
- Economics of Development. (5Th Edition). New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Fargomeli, Fanesa. (2014). Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur. *Journal Acta Diurna Vol. III*, No. 3 Tahun 2014.
- Perkins, H.P., S. Radelet, D.R. Snodgrass, M. Gillis dan M. Roemer. (2001).
- Studi Pengembangan Kelembagaan Berdasarkan Kultur Masyarakat Lokal pada Kelompok Nelayan. *Jurnal Antropologi. Vol. 16*. No. 2. ISSN: 1410-8356.
- Tampubolon, Dahlan. (2012). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal SOROT Vol. 8* No. 2. Lembaga Penelitian Universitas Riau.
- Todaro, P., Michael and Smith, C., Stephen. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Yapanto, L.M. (2021). Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bone Bolango. Disertasi. Universitas Brawijaya. Malang

Zamzami, Lucky. (2010). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatera Barat dalam *Jurnal MIMBAR*, Vol. XXVII, No. 1: 113-125.

Tentang Penulis



Dr. Lis M. Yapanto, S.Pi. M.M. lahir di Gorontalo, 3 Agustus 1969. Menyelesaikan Pendidikan: S1 Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sam Ratulangi Manado; S2 Manajemen Pada Sekolah Tinggi Ekonomi ABI Surabaya dan S3 Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Pasca Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Saat ini sebagai pengajar di Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo Fokus riset. Ekonomi perikanan dan kelautan. Beberapa publikasi beliau dapat ditelusuri melalui ID Google Scholar: zTOz4a0AAAAJ, ID Sinta: 6659410, Scopus ID: 57212149261 dan Researcher ID: T-4160-2018.